

### BAB III

## DINAMIKA ARGUMENTASI AGRESI MILITER AS KE IRAK TAHUN 2003

Sudah sepuluh tahun semenjak pertama kali Amerika Serikat melancarkan Invasi militer terhadap Irak pada tahun 2003. Pada bulan Mei 2003 pertama kali pasukan militer Amerika Serikat yang dibantu oleh pasukan Inggris, Australia dan Polandia mengepung negara Irak dari berbagai penjuru kota. Operasi yang diberi kode “Pembebasan Irak” tersebut memiliki beberapa tujuan utama yaitu melucuti senjata pemusnah masal yang dituduhkan kepada Irak, mengakhiri rezim kediktatoran Saddam Hussein yang ditengarai adalah pemimpin yang sering melakukan tindakan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya khususnya bangsa Kurdi yang mendiami bagian utara Irak dan melawan terorisme yang selama ini menjadi kepentingan Amerika Serikat dalam misi mereka di Timur Tengah.<sup>24</sup>

Setelah satu dekade perang tersebut diperkirakan telah memakan biaya hingga 1 triliun US Dollar merupakan riset yang dilakukan oleh Badan Riset Amerika Serikat. Dimana biaya tersebut di gunakan untuk mendukung keberadaan militer Amerika Serikat di Irak. Namun pemenang Nobel ekonomi, Joseph Stiglitz dan akademisi dari Universitas Harvard, Linda Bilmes, mendapatkan perhitungan yang jauh lebih besar yaitu mencapai 3 triliun US Dollar dengan memasukan dampak dari perang tersebut kedalam anggaran negara dan perekonomian Amerika Serikat.

---

<sup>24</sup>Inter Press Service, “why did US invade Iraq?”, diakses dari <http://www.ipnews.net/2008/02/politics/why-did-the-us-invade-iraq/> pada tanggal 6 Oktober 2014

Sedangkan pemerintah Inggris telah mengucurkan dana sebesar 14 juta USD untuk mendanai sebagian besar militer dan 861 juta USD untuk bantuan umum.<sup>25</sup>

Invasi tersebut juga telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Setidaknya ada 461.000 jiwa dari warga Irak telah melayang akibat dari invasi secara langsung ataupun konflik sektarian yang terjadi tetapi juga karena hancurnya fasilitas publik negara tersebut seperti ketersediaan air bersih dan listrik. Jumlah korban tersebut dilakukan oleh tim peneliti dari Amerika Serikat, Kanada, dan Irak yang melakukan survei secara acak pada 2.000 rumah tangga di 18 provinsi di Irak dalam jangka waktu Mei hingga Juli 2011.<sup>26</sup> Sedangkan dari pihak koalisi Amerika Serikat setidaknya ada 200.000 pasukan yang di terjunkan sejak pertama kali misi "pembebasan Irak" dilancarkan. Dan 4.800 diantaranya telah tewas dalam medan pertempuran.<sup>27</sup>

*"Lebih dari 31.000 personil militer AS cedera dan banyak mereka yang setelah dikerahkan ke medan tempur itu menderita stres, gangguan otak dan mengalami gangguan psikologis."*<sup>28</sup>

Dalam melakukan misi "pembebasan" tersebut, Amerika Serikat sebagai sebuah negara adidaya tidak sendiri. Meskipun mendapat kecaman luas dari berbagai

---

<sup>25</sup> BBC.UK "Perang Irak dalam angka" diakses dari [http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/2013/02/130216\\_irak\\_statistik](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2013/02/130216_irak_statistik), pada tanggal 6 oktober 2014 pada pukul 19:14

<sup>26</sup> BBC.UK, "Irak Perang" diakses dari [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/10/131016\\_irak\\_perang](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/10/131016_irak_perang), pada tanggal 6 Oktober 2014 pada pukul 18:25 WIB

<sup>27</sup> AntaraneWS, "Perang Irak Tewaskan 120000 orang", diakses dari <http://www.antaraneWS.com/berita/263405/perang-irak-tewaskan-120000-orang>, pada tanggal 6

negara di dunia namun Amerika Serikat didukung oleh negara-negara seperti Inggris, Australia dan Polandia.<sup>29</sup> Inggris sebagai negara pendukung juga mengirim pasukannya berjumlah sekitar 45.000 prajurit, serta Australia dan Polandia dengan masing masing pasukan 2.000 dan 200 tentara guna bergabung dengan koalisi bentukan Amerika Serikat.<sup>30</sup>

## **A. Faktor-Faktor Internal Irak yang Mendorong Invasi Militer Amerika Serikat**

### **A.1 Kepemilikan Senjata Pemusnah Massal Irak**

Tuduhan Amerika Serikat terhadap Irak, bahwa Irak telah memiliki dan terus mengembangkan senjata pemusnah masal (Mass Destruction Weapon) merupakan salah satu alasan utama Amerika Serikat melakukan serangan invasi militer. Permasalahan mengenai senjata pemusnah masal selalu menjadi perhatian besar Amerika Serikat terhadap rezim Saddam Hussein yang saat itu sedang berkuasa. Kepemilikan senjata pemusnah masal tersebut sesungguhnya tidak hanya kepemilikan senjata nuklir yang dituduhkan, tetapi juga mengenai kepemilikan senjata kimia dan senjata biologi yang dapat mengancam terhadap masyarakat lokal maupun internasional.

Pengembangan senjata kimia dan biologi menjadi perhatian bagi pemimpin Irak sejak tahun 1970-an dimana pemerintah memberikan kemudahan uang, teknis

---

<sup>29</sup> Tempo, "Satu Dekade Invasi Amerika Serikat ke Irak", diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/20/118468110/Satu-Dekade-Invasi-Amerika-Serikat-ke-Irak>, diakses pada 6 Oktober 2014 pada pukul 18:40

<sup>30</sup> Trias Kusurbuana, "Irak Korban Ambisi kaum "Hambakik"" Kompas, Jakarta, 2005 hal xxvii

dan sumber daya manusia. Program pengembangan tersebut merupakan bagian dari revitalisasi militer Irak dalam rangka perlombaan pengembangan senjata militer dengan Iran. Irak memilih mengembangkan senjata kimia dan biologi sebagai pengimbang strategis di kawasan Timur Tengah menyusul reaktor nuklir Irak yang telah di gempur melalui serangan udara oleh pasukan Israèl pada tahun 1981. Semenjak itu pengembangan senjata kimia dan biologi mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Keberhasilan Irak juga didukung oleh kemampuannya dalam merangkul negara-negara Timur Tengah, Eropa barat dan Timur dalam alih teknologi senjata kimia dan teknologi.<sup>31</sup>

Dibidang senjata boilogi, Irak memfokuskan untuk melakukan riset dan produksi atas beberapa jenis, terutama jenis Batolinium, Aflatoksin, dan Anthrax. Kasus larinya dua menantu Saddam Hussein, Hussein Kamel Hassan dan Saddam Kamel Hassan ke Jordania pada Agustus 1995 memaksa Irak untuk pertama kalinya mengakui bahwa program senjata biologinya telah masuk ke tingkat produksi untuk tujuan militer sebelum meletusnya perang teluk II tahun 1991. Di antara pengakuan Irak adalah memasang bakteri biologi pada 166 ton 25 rudal balistik tipe al-Hussein.<sup>32</sup>

Senjata biologi sesungguhnya merupakan senjata yang menggunakan patogen (bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya) sebagai alat untuk

---

<sup>31</sup> Andriyansyah, "Penyerbuan Amerika Serikat Atas Irak dan Dampaknya Terhadap Kehidupan 2003-

membunuh, melukai atau melumpuhkan musuh. Dalam cakupan yang lebih luas ternyata senjata biologi tidak hanya mencakup tentang penggunaan patogen tetapi juga toksin (racun) berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Dampak yang dihasilkan tidak hanya dapat menyerang manusia, tetapi juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.<sup>33</sup>

Penggunaan senjata biologi sesungguhnya telah dilarang dalam konvensi senjata biologi tahun 1972 yang di tandatangani oleh lebih dari 100 negara. Alasan di adakannya pertemuan dan pelarangan ini adalah untuk menghindari dampak yang dihasilkan oleh senjata biologi yang dapat merenggut jutaan nyawa manusia. Selain hal tersebut juga dapat menghancurkan kehidupan perekonomian bagi suatu negara yang terkena dampak langsung dari senjata biologi tersebut. Dalam perjanjian tersebut hanya melarang mengenai pembuatan dan penyimpanan senjata biologi tetapi tidak ada aturan yang melarang penggunaan senjata biologi.<sup>34</sup>

Perang teluk I dan II merupakan puncak kejayaan Irak dalam pengembangan dan penggunaan senjata lengkap mereka. Kecaman yang dituai berdatangan dari dalam maupun luar negeri. Irak disebut telah menggunakan senjata pemusnah masal dalam perang teluk I dan II namun pada saat itu Amerika Serikat tidak secara langsung kemudian mengancam dan mengambil tindakan terhadap apa yang telah dilakukan presiden Saddam Hussein. Karena masih adanya kepentingan politik yang

---

<sup>33</sup>Iraq Watch, "Iraq's Biological Weapon Program" yang diakses dari

[http://www.iraqwatch.org/iraq/biological-weapon-program/2014/05/2014-05-05](#)

ekonomi membuat Amerika Serikat masih belum perlu untuk mendongkel Saddam Hussein dari kursi kepemimpinan Irak.

Amerika Serikat mulai merubah posisi mereka terhadap Irak pasca invasi militer yang dilakukan Irak terhadap Kuwait. Semenjak invasi tersebut Amerika Serikat mulai menggunakan ketidakpuasan rakyat Irak terhadap kepemimpinan Saddam Hussein untuk mencari celah mencabut kursi kepemimpinan Irak. Disini Amerika Serikat melakukan pengalihan isu dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Irak telah menggunakan senjata pemusnah masal terhadap invasi Kuwait dan penyerangan terhadap suku kurdi di Irak Utara.<sup>35</sup>

Amerika Serikat dan Inggris terus menuduh bahwa Irak tetap mengembangkan senjata kimia dan biologi untuk tujuan militer dan senjata tersebut sudah bisa dipergunakan dalam jangka waktu 45 menit saja. Adanya pengembangan laboratorium tidak permanen yang bisa dipindah kemana saja serta tuduhan bahwa telah melakukan perdagangan illegal untuk mendapat jenis barang dari luar negeri. Maka dari itu Amerika Serikat sangat meragukan komitmen Irak untuk melaksanakan semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyangkut senjata pemusnah masal agar sanksi PBB tetap berlaku terhadap Baghdad. Apalagi pada peristiwa 9/11 GW Bush menuduh Irak sebagai salah satu pendukung gerakan teroris Al Qaeda sehingga

seperti tidak ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan selain menjatuhkan rezim Saddam Hussein dengan cara invasi militer.<sup>36</sup>

Namun setelah tiga minggu dilakukan pencarian terhadap pengembangan dan penyimpanan persenjataan pemusnah massal yang dituduhkan tersebut masih belum menemukan hasil. Hal tersebut memperkuat dugaan bahwa Amerika Serikat sengaja melakukan kamufase pengalihan isu agar mendapat legitimasi terhadap penyerangan invasi militer terhadap Irak. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari David Kay, seorang ketua inspektur persenjataan Amerika Serikat di Irak pada tanggal 28 Januari 2004, mengatakan kepada seluruh dewan senat bahwa mereka tidak pernah menemukan senjata pemusnah massal yang selalu menjadi alasan dari peperangan ini, dan hasilnya adalah para intelejen telah keliru.<sup>37</sup>

## A.2 Keterlibatan Irak Dengan Organisasi Teroris Al-Qaeda

Tragedi 9/11 merupakan titik balik pemerintah Amerika Serikat dalam menyatakan perang terhadap terorisme internasional. Pada saat itu presiden GW Bush dengan lantang menyuarakan perang terhadap terorisme yang sangat terkenal dengan "*Bush Doctrine*". Doktrin tersebut berupaya membelah dunia menjadi hitam dan putih. Dalam pidato digunakan Bush sebagai legitimasi bagi Amerika Serikat untuk menginvasi negara yang memiliki hubungan dengan kelompok teroris Al-Qaeda.

---

<sup>36</sup> ibid

<sup>37</sup> Christian Miller, "Blood Money", hal 21, dalam skripsi Ardiansyah, "Penyerbuan Amerika Serikat Terhadap Organisasi Teroris Terhadap Kebijakan 2002-2007" 2014, hal 42

*"We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime." G.W Bush-President of US<sup>38</sup>*

Seperti yang dilansir dari buku Saddam Melawan Amerika karya dari peneliti LIPI bernama Dhurorudin Mashad, dkk. Dari penerbit Pensil-324, 2003. Disitu dikemukakan, bahwa tuduhan lain yang diungkapkan AS adalah keterlibatan pemerintah Saddam Hussein dengan jaringan Al-Qaeda. Menurut AS, Irak turut membidani jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden, yang dituduh sebagai otak dari penyerangan 11-09-2001 atas gedung kembar WTC di New York dan Pentagon di Langley, Virginia, AS.

Para pejabat Irak diketahui berulang kali melakukan pertemuan dengan para personel Al-Qaeda, khususnya dengan para anggota sel yang dipimpin al-Zarqawi yang tinggal di suatu tempat di Irak di bagian timur laut. Irak aktif berhubungan dengan Al-Qaeda terutama setelah peristiwa peledakan bom di Kedutaan Besar AS di Kenya tahun 1998. Irak ditengarai telah mendanai kaum teroris jauh sebelum nama jaringan Al-Qaeda dikenal seluruh dunia.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> The Guardian, "GW Bush Speech", diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2001/sep/21/september11.usa13>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2014 pukul 11:09

<sup>39</sup> Dhurorudin Mashad, dkk, "Saddam Melawan Amerika", dalam skripsi Andriansyah, Opcit hal 43



Adalah Paul D. Wolfowitz seorang deputi menteri pertahanan AS yang sangat bersih keras untuk melancarkan serangan terhadap Irak. Ia adalah mantan duta besar AS untuk Indonesia (1986-1989) pada masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Setelah kembali ke AS ia menempati jabatan strategis yaitu deputi menteri pertahanan AS tertanggal 14 April 1989.

Wolfowitz dikenal sebagai seorang yang neokonservatif dan straussian karena pandangannya yang pro israel, dan pendukung kuat perang Irak. Ia adalah salah satu orang yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan politik GW Bush yang kemudian menjadi sebuah doktrin politis untuk melegalkan perang Irak. Wolfowitz sering disebut sebagai “the godfather of the Iraq war”. Sebutan tersebut menempel pada dirinya karena ialah yang pertama kali mengusulkan agar Saddam Hussein disingkirkan pasca tragedi 11 september. Menurutnya, membiarkan Saddam tetap berkuasa merupakan kesalahan besar dan selama Saddam berkuasa, tidak akan pernah ada cerita bahwa Irak akan kembali ke tengah pergaulan bangsa-bangsa dunia. Dengan demikian perubahan rezim adalah satu-satunya jalan yang harus di ambil AS.<sup>40</sup>

Tokoh lain yang juga ikut memberikan bukti keterlibatan Irak dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda adalah Donald Rumsfeld, ia adalah menteri pertahanan pada pemerintahan GW Bush. Rumsfeld menyatakan bahwa pentagon dan CIA memiliki bukti “asli” atau “hitam di atas putih” yang mengaitkan Irak dengan

---

<sup>40</sup> Trias Kuncahyono, opcit hal 25-30

Alqaeda, meskipun ketika itu Rumsfeld menolak untuk membeberkan bukti-bukti intelejen yang menjadi dasar pernyataan itu. Belakangan baru terungkap bahwa semua bukti itu tidak ada. Dalam bahasa Wolfowitz, penyebutan senjata pemusnah massal dan hubungan Irak dengan Al Qaeda itu sekedar "alasan birokratis".<sup>41</sup>

### A.3 Saddam Hussein Sebagai Seorang Pemimpin Diktator

Dilema yang merebak adalah ketika Presiden AS, GW Bush menyebutkan bahwa Saddam Hussein merupakan seorang pemimpin yang diktator. Kepemimpinan Saddam Hussein dianggap sebagai sebuah perlawanan terhadap nilai-nilai demokrasi yang mana adalah nilai kebebasan dan kedaulatan ditangan rakyat yang dijunjung tinggi. Adanya bukti kekejaman yang dilakukan oleh Saddam Hussein terhadap bangsa suku Kurdi yang memberontak mendiami Irak bagian utara menjadi senjata ampuh dalam menggulingkan rezim Saddam Hussein.

Eksodus besar-besaran bangsa suku Kurdi dari Irak terjadi pada tahun 1991 yang merupakan eksodus kedua orang-orang Kurdi dari Irak Utara. Pertama terjadi pada tahun 1988, hari itu hari jumat 16 maret 1988. Pesawat tempur Irak menggempur Halabaja. Sebuah kota yang berada di Provinsi Sulaymaniya, sekitar 260 km dari pusat kota Baghdad. Letak Halabaja dekat dengan perbatasan Iran

sekitar 11 km. Hal tersebut mengisyaratkan kuat bahwa ambisi kekuasaan Saddam di baluti dengan kekejaman kediktatoran.<sup>42</sup>

Saddam Hussein kecil hidup dengan kehidupan yang keras. Sejak kecil ia tinggal dengan ayah tirinya Hassan Al-Ibrani yang juga merupakan pamannya. Ia pernah kabur dari rumah lantaran permintaannya untuk bersekolah tidak di loloskan. Ia lalu nekat meninggalkan rumah dan pergi kerumah paman yang lainnya. Bersama pamannya Khairullah Tufiah ia mendapat akses untuk pendidikan. Sehingga dampak dari kehidupannya yang keras tersebut membentuk karakter Saddam yang juga keras. Cerminan dari kehidupannya yang keras itu kemudian terlihat dari gaya kepemimpinannya ketika berkuasa di Irak sebagai pimpinan tertinggi. Adanya pembangkangan dan pemberontakan mendapat tindakan yang represif dari pemerintah.

Amerika Serikat sebagai negara adidaya menggunakan label sebagai “polisi dunia” dalam mengintervensi Irak dalam urusan “pembebasan Irak” dari rezim diktator Saddam Hussein. Legalitas AS didapat setelah adanya *UN charter* yang menyebutkan tentang komunitas internasional memiliki tanggung jawab “*Responsibility to Protect*” dalam hal ini adalah warga Irak yang terdiskreditkan haknya.

*“The three pillars of the responsibility to protect, as stipulated in the Outcome Document of the 2005 United Nations World Summit (A/RES/60/1, para. 138-140)*

---

<sup>42</sup> Andriansyah, opcit hal 51

*and formulated in the Secretary-General's 2009 Report (A/63/677) on Implementing the Responsibility to Protect are:*

*The State carries the primary responsibility for protecting populations from genocide, war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing, and their incitement;*

*The international community has a responsibility to encourage and assist States in fulfilling this responsibility;*

*The international community has a responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other means to protect populations from these crimes. If a State is manifestly failing to protect its populations, the international community must be prepared to take collective action to protect populations, in accordance with the Charter of the United Nations."<sup>43</sup>*

Ketiga prinsip dasar tersebut kemudian menjadi dasar hukum AS yang mengatas namakan sebagai komunitas internasional untuk "menghukum" rezim diktator Saddam Hussein terhadap masyarakat bangsa suku Kurdi yang mendiami bagian Irak Utara. Maka dari itu operasi militer yang dilancarkan terhadap Irak diberi kode "pembebasan Irak".

Namun hal tersebut menjadi pertanyaan besar dimana disisi lain AS tetap mempertahankan kekuasaan diktator negara Timur Tengah lain yaitu Arab Saudi dan terkesan mendukung pemerintahan diktator Hosni Mubarak di Mesir. Hal tersebut banyak menimbulkan hipotesa bahwa AS menerapkan sistem standar ganda bahwa negara mana yang kemudian tidak mendukung kepentingan politik AS maka negara tersebut akan diganti menjadi rezim yang mendukung kepentingan politik AS.

---

<sup>43</sup> United Nations, "Responsibility to Protect", diakses dari

<http://www.un.org/en/events/genocideprevention/responsibility.shtml>, diakses pada tanggal 9 Oktober

## **B. Faktor Internal Amerika Serikat yang Mendukung Invasi Militer ke Irak**

Amerika Serikat memiliki sebuah strategi baru dalam menjalankan agenda politiknya terhadap negara-negara di Timur Tengah. Dimana AS dalam hal ini memanfaatkan peristiwa 9/11 sebagai dalih untuk melancarkan politik perang terhadap terorisme dan menginvasi negara-negara Timur Tengah.

### **B.1 Adanya dukungan Internasional**

Pada akhirnya, setiap orang mengetahui lebih dari 3.000 orang tewas dalam tragedi 11 september 2001. Bukan hanya itu, orang juga mengetahui bagaimana dan betapa berat penderitaan yang ditanggung para keluarga yang ditinggal anggota keluarganya karena menjadi korban tragedi itu dan betapa berat perjuangan korban yang selamat.

Tak lama setelah tragedi itu, berbagai reaksi mulai muncul dari seluruh penjuru dunia. Presiden GW Bush yang saat tragedi itu terjadi sedang berada di florida menyebut ksi tersebut sebagai “serangan teroris”. Karena itu pemerintah AS akan “memburu” pihak yang bertanggung jawab. Bush juga menegaskan bahwa militer AS dan seluruh dunia dalam kondisi siaga satu dan telah mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk meneruskan perintah.

Pemerintah RI kala itu juga mengutuk tindakan keji itu. Siaran pers dari Sekretariat Negara Jakarta, pada hari rabu dini hari, 12 September 2001, menyatakan pemerintah Indonesia sangat terkejut atas peristiwa tragis yang terjadi hampir

bersamaan di New York dan Washington DC itu. Kuwait dan Qatar mengutuk serangan teroris itu. "Kuwait menolak seluruh bentuk terorisme, mengutuk aksi terorisme itu, dan menyatakan sukacita yang mendalam". Presiden Russia, Vledimir Putin melalui kantor berita Interfax meminta presiden GW Bush untuk tidak membiarkan seluruh pelaku kejadian bebas dari hukuman. Dari Tokyo, PM Jepang Junichiro Koizumi langsung menawarkan bantuan kepada Washington. Sedangkan dari Palestina, Pemimpin Yasser Arafat menyebut serangan tersebut sebagai kejahatan "terhadap kemanusiaan". Kecaman juga datang dari pemimpin tertinggi umat Katholik dari Vatikan Paus Johannes Paulus II, selain mengecam aksi tersebut juga mengucapkan belasungkawa bagi para korban. Dari London diberitakan Menlu Inggris Jack Straw mengatakan, Inggris menyiagakan pasukannya untuk menghadapi kemungkinan buruk. Aksi melawan terorisme juga di dinyatakan Menlu Jerman Joschka Fischer.<sup>44</sup>

Dukungan yang bertubi-tubi yang datang dari berbagai penjuru dunia bagi AS untuk melawan terorisme itu, semakin menguatkan niat AS untuk melakukan aksi pembalasan terhadap kelompok apapun, negara manapun, yang memberikan bantuan, mendukung, dan memberi tempat bagi kelompok teroris. Dengan penuh keangkuhan dan percaya diri Bush lantas menyatakan "kami akan memimpin dunia melawan

## B.2 Adanya Dukungan Publik

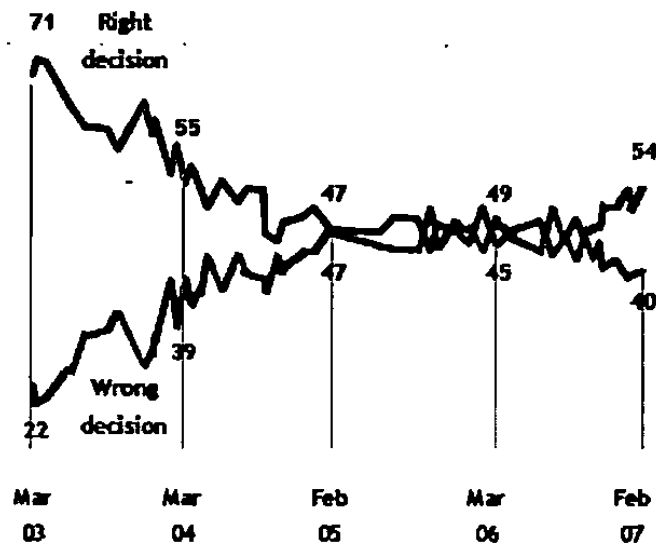
Kejadian 9/11 merupakan sejarah kelam bagi Amerika Serikat. Kejadian tersebut menimbulkan trauma mendalam terhadap masyarakat AS pada umumnya. Hal tersebut menimbulkan berbagai pemikiran-pemikiran dan kajian terhadap terorisme dan islam. Hal tersebut kemudian menjadi opini publik dimana terlihat dari berbagai survey yang dilakukan terhadap masyarakat AS. Pada tahun 2002 dilakukan survey oleh *CCSR* yang merupakan lembaga survey nasional AS menunjukkan bahwa (91%) masyarakat peduli terhadap terorisme internasional dan (86%) diantaranya khawatir terhadap pengembangan senjata pemusnah massal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>46</sup>

Hal tersebut berimplikasi terhadap hasil survey yang dilakukan oleh *USA Today/Gallup Poll* yang mengindikasikan (75%) masyarakat AS mendukung upaya invasi militer yang dilakukan AS terhadap Irak pada tahun 2003.<sup>47</sup> Kejadian 9/11 menempatkan masyarakat AS dalam posisi yang tertekan dan terjebak akan ketakutan terhadap aksi terorisme. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan pemerintahan GW Bush dalam mengakumulasikan kemarahan masyarakat AS untuk melegalkan tindakannya dalam memerangi teroris di negara manapun termasuk Irak.

---

<sup>46</sup> D.N Kusumaningrum, "the practice of the united states coercive diplomacy toward iraq in 2003", *skripsi fakultas ilmu sosial dan fiisal jurusan hubungan internasional UMY tahun 2000*, hal 78

### Decision to Use Military Force in Iraq?



Bagan 2 Survey yang memperlihatkan tingginya dukungan publik terhadap Invasi militer AS ke Irak 2003<sup>48</sup>

Dengan mendapat dukungan dari opini publik bahwa teror yang dilakukan terhadap masyarakat AS merupakan ancaman bagi kepentingan nasional AS, maka kebijakan invasi tersebut mendapat “restu” publik. Dengan mengatas namakan keamanan nasional AS dengan senantiasa meletakan pasukan militernya di negara negara kantong teroris seperti yang telah di tuduhkan AS terhadap Irak. Presiden GW Bush menggunakan nama rakyat AS untuk menundukan terorisme di seluruh dunia.

### B.3 Adanya Dukungan Kongres Amerika Serikat

<sup>48</sup> Pewresearch, “Trend in Public Opinion about the War in Iraq 2003-2007”, diakses dari ... ”



Kebijakan GW Bush untuk dapat menginvasi Irak dengan pasukan koalisi kemudian tidak semerta-merta akan lolos sekiranya tidak ada dukungan yang cukup dari dalam negeri khususnya masyarakat. Dukungan masyarakat tersebut kemudian tercermin dari perwakilan rakyat yang duduk di Senat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (HoR). Dalam menggalang dukungannya terhadap invasi tersebut, presiden GW Bush berupaya meyakinkan kongres bahwa Irak adalah ancaman terhadap dunia internasional. Pengembangan terhadap senjata pemusnah massal menjadi isu penting yang di hembuskan Presiden GW Bush terhadap kongres. Dalam pernyataannya Bush menyatakan *"Iraq had a weapons program," Bush said. "Intelligence throughout the decade showed they had a weapons program. I am absolutely convinced with time we'll find they did have a weapons program."*<sup>49</sup>.

Selain adanya senjata pemusnah massal yang di kembangkan oleh Irak, kepemimpinan yang otoriter serta keterlibatan dengan kelompok teroris Al-Qaeda merupakan alasan utama Bush menggalang dukungan kongres. Situasi kondisi masyarakat Amerika Serikat yang pada saat itu terlihat seperti "latah" terhadap isu terorisme kemudian terproyeksi dari dukungan kongres terhadap kebijakan Bush dalam pemungutan suara terhadap kebijakan invasi militer ke Irak.

Pada bulan Oktober, 2002 kongres mengambil pemungutan suara yang merujuk kepada resolusi kebijakan presiden Bush untuk melancarkan invasi ke Irak.

---

<sup>49</sup> CNN Website, "Bush Absolutely Convinced Iraqi WMD Will Be Found", diakses dari <http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/06/09/wmd.controversy/index.html> diakses pada tanggal

Kebijakan tersebut didasarkan pada 12 poin yang membenarkan invasi militer AS ke Irak yaitu :

a. Ketidakpatuhan Irak terhadap persyaratan gencatan senjata 1991 termasuk usaha menghalangi UN dalam menginspeksi pengembangan senjata pemusnah massal

b. Irak secara aktif melanjutkan program pengembangan senjata kimia dan biologi serta aktif berupaya mengembangkan program senjata nuklir yang akan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional AS, stabilitas keamanan negara-negara teluk dan perdamaian internasional

c. Adanya tindakan brutal yang dilakukan pemerintah Irak terhadap penduduk sipil

d. Adanya kemampuan dan keinginan untuk menggunakan senjata pemusnah massal bagi negara lain maupun penduduk Irak sendiri

e. Kebencian Irak terhadap Amerika Serikat yang tercermin pada upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden AS GHW Bush, 1993 serta menembak pesawat koalisi dalam upaya menerapkan zona larangan perang pada perang teluk 1991

f. Al-Qaeda sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas serangan yang dilancarkan terhadap WTC 9/11, diketahui berada di Irak

g. Irak melanjutkan pemberian bantuan terhadap organisasi teroris internasional lainnya, termasuk kelompok teroris anti Amerika Serikat

h. Irak memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga pejuang yang tewas di

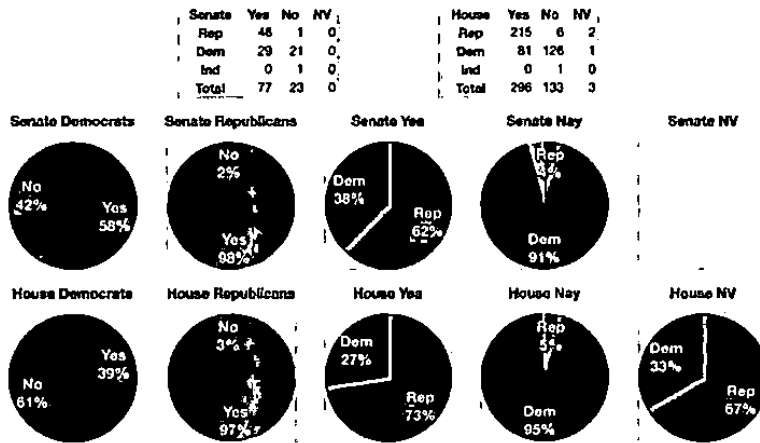
- i. Upaya kongres dan Presiden untuk melawan teroris, baik yang berusaha memberikan bantuan maupun yang berupaya menyembunyikannya
- j. Aturan yang terdapat dalam konstitusi dari kongres terhadap Presiden untuk melawan terorisme anti Amerika Serikat
- k. Keinginan dari pemerintahan Turki, Kuwait dan Arab Saudi untuk menyingkirkan Saddam Hussein dari kekuasaan
- l. Mengutip dari UU Kemerdekaan Irak 1998, bahwa resolusi kebijakan AS untuk menggantikan rezim pemerintahan Saddam Hussein dengan pemerintahan yang demokratis.<sup>50</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat AS (HoR) yang terdiri dari dua kubu yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat menghasilkan suara 297 setuju, 133 menolak, dan 3 abstain. Sedangkan Senat yang menjadi representasi dari tiap wilayah di AS menghasilkan suara 77 setuju dan 23 tidak setuju terhadap kebijakan tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Wikipedia website, "Iraq Resolution", diakses dari

[https://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi\\_4679](https://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi_4679), diakses pada tanggal 10 Oktober 2014 pada



Bagan 3 Menunjukkan Perbandingan Pemungutan Suara di Kongres

Karena dukungan dari kongres tersebut kemudian Presiden Bush dengan berani menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memiliki satu suara bulat terhadap apa yang diputuskan bagi masa depan Irak. Pembebasan Irak menjadi agenda utama Amerika Serikat setelah invasi militer ke Afghanistan pada 2001. Kebijakan tersebut kemudian menjadi sebuah resolusi yang di deklarasi pada tahun 2002. Kebijakan tersebut disebut sebagai "Operansi Damoculus: Pasukan Militer Melawan Resolusi